



um
The Learning
University



Kliping Berita UM

Jawa Pos Radar Malang 6 Juli 2017



TUGAS BARU: Prof Dr Hariyono MPd (kanan) bersama Wakil Presiden RI ke-6 Try Sutrisno usai pelantikan di Gedung III Kemensetneg, Jakarta, kemarin (5/7).

Prof Dr Hariyono MPd, Wakil Rektor I UM yang Dipercaya Jadi Deputy Unit Kerja Presiden

Tanpa Seleksi, Kaget saat Terima Surat Jokowi

Prof Dr Hariyono MPd resmi dilantik sebagai Deputy Bidang Advokasi Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP), kemarin (5/7). Di unit kerja ini, dia bakal bekerja sama dengan sejumlah tokoh nasional. Mulai dari Megawati Soekarnoputri, KH Said Aqil Siroj, hingga Try Sutrisno.

DAVIQ UMAR AL FARUQ

SUASANA khidmat tampak pada proses pelantikan tiga orang deputy UKP-PIP, di Gedung III Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) RI kemarin pagi. Proses pelantikan itu dipimpin oleh Ketua UKP-PIP Yudi Latief.

Adapun, tiga deputy itu berasal dari latar belakang yang berbeda. Prof Dr Hariyono MPd hingga saat ini masih tercatat sebagai wakil rektor I Bidang Akademik Universitas Negeri Malang (UM). Lalu, ada Dr Anas Saidi yang punya karir di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) »

► Baca Tanpa... Hal 7

Beberapa Kali Menulis Buku soal Pancasila

■ TANPA...

Sambungan dari halaman 1

Sementara Dr Silverius Yoseph Soeharso SPsi SE MM tercatat sebagai dosen Fakultas Psikologi Universitas Pancasila Jakarta.

Dari tiga nama itu, hanya Hariyono yang berasal dari Malang. Siapa sebenarnya Hariyono itu? Apa yang membuat dia bisa masuk dalam struktur UKP-PIP?

Hariyono mengungkapkan, tidak ada tahapan tes maupun seleksi yang dia lalui. Hariyono baru tahu dirinya ditunjuk menjadi deputy saat dipanggil ketua UKP-PIP, Yudi Latief, di Jakarta, 16 Juni 2017. "Saya langsung disodori Surat Keputusan (SK) Presiden," ujar pria 53 tahun ini.

Surat Keputusan Presiden RI Nomor 74/TPA Tahun 2017 tentang Pengangkatan Deputy di Lingkungan UKP-PIP itu ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 16 Juni lalu. Sebuah penunjukan yang tak mungkin ditolak Hariyono. Apalagi, selama ini, Hariyono

memang punya atensi tinggi terhadap apa pun yang berkaitan dengan Pancasila. Guru Besar Bidang Sejarah Politik di Fakultas Ilmu Sosial UM ini beberapa kali menuliskan buku-buku yang berkaitan dengan Pancasila.

Di antaranya, berjudul *Nasionalisme Pancasila dan Kewarganegaraan* yang terbit pada 2010 lalu serta *Ideologi Pancasila: Roh Progresif Nasionalisme Indonesia* pada 2014. Dari sisi itu saja, Hariyono punya kelayakan untuk mengemban tugas sebagai deputy UKP-PIP.

Jadi, Hariyono tidak akan canggung ketika harus dihadapkan pada tugasnya sebagai deputy UKP-PIP Lembaga pemerintah nonkementerian itu bertugas membantu presiden dalam merumuskan arah kebijakan umum pembinaan ideologi Pancasila.

UKP-PIP terbentuk pada 1 Juni 2017. Ada sembilan orang yang menjadi dewan pengarah UKP-PIP. Seluruhnya adalah tokoh nasional.

Mulai dari Megawati Soekar-

noputri; Try Sutrisno; M. Mahfud MD; Syaifi Ma'arif; Ma'ruf Amin; KH Said Aqil Siroj, Andreas Anangguru Yewangoe, Wisnu Bawa Tenaya, dan Sudhamek. UKP-PIP diketuai Yudi Latief dan dibantu tiga deputy.

Alumnus SMAN 5 Malang ini menyatakan, salah satu fokus UKP-PIP adalah mencegah meledaknya konflik horizontal di tanah air. "Jangan sampai terjadi. Kita bersama-sama harus merevisi anggapan bahwa Indonesia hanya milik satu agama maupun satu etnis," kata pria kelahiran Malang, 27 Desember 1963 tersebut.

Sementara sebagai deputy bidang advokasi, Hariyono punya tugas melakukan pembinaan ideologi Pancasila pada lembaga pemerintah, baik di pusat maupun daerah. Caranya bisa melalui pendidikan dan pelatihan (diklat). Baik itu lewat pendidikan formal maupun nonformal. "Harapannya, aparat dan masyarakat sudah sinkron dengan dasar negara Pancasila," bebernya.

Kemudian, hal lain yang dia

lakukan adalah mengkaji isu-isu di masyarakat. Salah satunya soal sikap toleransi. Termasuk ketika ada anjuran untuk tidak mengucapkan selamat hari raya kepada pemeluk agama lain. Padahal, di sisi lain, ada anjuran untuk menjaga sikap toleransi.

"Untuk itu, diperlukan sinergitas program pendidikan karakter dari Kemendikbud yang berkaitan dengan Pancasila, kebhinekaan, dan lain-lainnya," tandas dia. Yang jelas, apa pun tugas dan tantangannya nanti, Hariyono mengaku siap.

Bahkan, sebagai konsekuensi penunjukannya sebagai deputy UKP-PIP, Hariyono harus meninggalkan jabatannya sebagai wakil rektor I UM. Ini menjadi tugas Rektor UM Prof Dr AH Rofi'uddin MPd untuk mencari penggantinya.

"Sementara waktu, jabatan itu akan langsung di-handle oleh rektor. Namun, kami akan segera menunjuk pejabat pengganti melalui mekanisme yang berlaku," jelas Rofi'uddin saat diwawancarai terpisah. (* / c2 / mufl)

